



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAPORAN MONEV CAPAIAN KINERJA

**BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesaikannya Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kinerja Tahun 2024 Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Melalui Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja ini diharapkan dapat menjadi informasi mengenai Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa akan datang. Peningkatan kinerja diperlukan agar Biro Organisasi dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara maksimal dalam merumuskan kebijakan daerah, penyiapan pengordinasian, pelaksanaan dan pencapaian target kinerja.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan, sehingga sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan, laporan ini sangat terbuka terhadap saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan dan perwujudan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.

Kupang, 31 Januari 2025

Plt. Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur



Djoese S.M. Nai Buti, S.Pt, M.Si
Pembina TK. I (IV/b)
NIP 197103291999031002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 69 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu unsur staf penyusun Kebijakan Daerah dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelayanan administrasi umum di Bidang Organisasi yang bertugas membantu Gubernur dan menyusun kebijakan organisasi daerah dibidang administrasi umum.

Untuk merealisasi tugas dan fungsi tersebut, Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, selama tahun anggaran 2024 telah melakukan evaluasi beberapa program/kegiatan/sub kegiatan dengan maksud agar dapat membantu dan mengawal tugas dan fungsi Biro Organisasi sehingga target kinerja dapat tercapai.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja ini diharapkan menjadi informasi mengenai Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa akan datang. Peningkatan kinerja diperlukan agar Biro Organisasi dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara maksimal dalam merumuskan kebijakan daerah, penyiapan pengordinasian, pelaksanaan dan pencapaian target kinerja.

1.2 Tugas dan Fungsi Biro Organisasi

Dalam melaksanakan tugas Biro Organisasi melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
2. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;

3. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
4. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten administrasi umum.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas :

1. Kepala Biro
2. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
3. Kepala Bagian Tata Laksana
 - Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
4. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
 - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Struktur Organisasi

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Biro Organisasi

Pada Rencana Strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, sebagai pedoman bagi perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Renstra Biro organisasi memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.2 Pejanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024. Maka setiap tahun setiap pimpinan perangkat daerah sesuai arahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, wajib menandatangani perjanjian kinerja. Perjanjian Kepala Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun rincian sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Tabel 2.2

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI				FORMULA INDIKATOR
				AWAL	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kualitas Penataan Kelembagaan, Tatallaksana, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Memiliki Predikat "Istimewa" (Kategori AA/Nilai = 80-90)	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Predikat RB "Istimewa" (Kategori AA/Nilai = 80-90) adalah Indikator yang mengukur tingkat kualitas hasil pelaksanaan RB oleh Perangkat Daerah yang memiliki Nilai/Indeks 80 - 90.	39,39	45,45	51,51	57,57	$\frac{\text{Jumlah PD Provinsi yang memperoleh Predikat RB "Istimewa"}}{\text{Total Jumlah PD Lingkup Provinsi NTT}} \times 100\%$
		Level Kematangan Kelembagaan	Level Kematangan Kelembagaan adalah Penilaian tingkat kemandirian Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Daerah menggunakan instrumen pengukuran dengan 11 (sebelas) variabel indikator yang meliputi: a. perencanaan; b. monitoring dan pengendalian; c. penjaminan mutu layanan; d. standar operasional prosedur.	40,67	45	47	49	$\frac{\text{Kematangan Organisasi}}{\text{Total Nilai PD Lingkup Provinsi NTT}} \times 100\%$
								$\frac{\text{Jumlah PD Lingkup Provinsi NTT}}{\text{Total Jumlah PD Lingkup Provinsi NTT}} \times 100\%$

	Presentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja "memuaskan" A.	Presentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja "memuaskan" A adalah aktifitas analisis yang sistematis untuk menilai penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada PD di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Tenggara Timur.	6	12	18	24	<p>Jumlah PD yang memperoleh nilai A (memuaskan) $\times 100\%$</p> <p>Jumlah PD Lingkup Provinsi NTT Jumlah PD yang $\%$</p>
--	--	---	---	----	----	----	---

B. Pelaksanaan Anggaran

1)	APBD	Urutan	Alokasi	Keterangan
	a) Belanja (Program)			
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp. 1.118.233.027,-	Realisasi minimal 90%
2	Penataan Organisasi		Rp. 706.014.973,-	Realisasi minimal 85%
	b) Pendapatan			
			Rp. -	-

2.3 Rencana Kerja pada Tahun 2024 pada Biro Organisasi meliputi program sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp. 706.014.973,-
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 172.340.650,-
 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 25.197.950,-
 - 1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 31.230.800,-
 - 1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp 23.716.600,-
 - 1.4 Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 92.195.300,-
 2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 2.1 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp. 0,-
 3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-
 - 3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 54.113.500,-
 - 3.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 45.886.500,-
 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 65.030.000,-
 - 4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 4.000.000,-
 - 4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 3.780.000,-
 - 4.3 Sub Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 57.250.000,-
 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 343.644.323,-

- 5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 38.208.840,-
 - 5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 2.400.000,-
 - 5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material dengan anggaran sebesar Rp. 44.235.563,-
 - 5.4 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 25.009.000,-
 - 5.5 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 233.790.920,-
 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dengan anggaran sebesar Rp 25.000.000,-.
- II. Program Penataan Organisasi dengan anggaran sebesar Rp 1.118.233.027,-.
1. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 363.329.250,-
 2. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas kinerja dengan anggaran sebesar Rp. 754.903.077,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2024 dan realisasi sampai dengan tanggal 30 Desember 2024 dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.1

Kode Rek	Uraian	Pagu Perubahan Anggaran 2024	Realisasi Desember Tahun 2024	Capaian
	Biro Organisasi	1.824.248.000	1.693.243.587	92,82
4.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan	706.014.973	649.992.087	92,06
4.01.02	Program Penataan Organisasi	1.118.233.027	1.043.251.500	93,29
4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Anjab	363.329.950	352.178.196	96,93
4.01.02.1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	125.000.700	118.219.793	94,58
4.01.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab/kota	30.356.250	28.790.250	95,79
4.01.02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	208.273.000	205.168.153	98,51
4.01.02.1.02	Fasilitasi RB dan AK	754.903.077	691.073.304	91,54
4.01.02.1.02.01	Fasilitasi Pelaksanaan RB	102.678.125	92.027.570	89,63
4.01.02.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi AK	255.606.250	240.908.851	94,25
4.01.02.1.02.03	Evaluasi pelaksanaan Budaya Kerja	52.678.125	13.797.346	26,19
4.01.02.1.02.04	Pengelolaan tatalaksana Pemerintah	130.356.250	124.589.630	95,56
4.01.02.1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	213.584.327	198.841.907	93,10
JUMLAH		1.824.248.000	1.693.243.587	92,82

3.2 Realisasi Anggaran dan Kegiatan Tahun 2024

I. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Renja/DPA 2024

Alokasi anggaran tahun 2024 dan realisasi sampai dengan tanggal 30 Desember 2024 dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.2

No.	Sub Kegiatan	Alokasi dana (Rp)	Target Desember (Rp)	Realisasi Desember %	Hasil	Ket.
1	Fasilitasi Kelembagaan Provinsi	125.000.700	118.219.793	94,58		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	167.700	167.700	100		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.812.000	2.812.000	100		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Cetak	6.515.000	6.515.000	100		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.960.000	4.960.000	100		
	Belanja Lembur	19.152.000	16.626.000	86,81		
	Honorarium Tim Pelaksana kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	20.700.000	19.400.000	93,72		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	61.694.000	58.739.093	95,21		
	Belanja Perjalanan Dinas dalam kota	9.000.000	9.000.000	100		
2	Fasilitasi Kelembagaan Kabupaten/ Kota	30.356.250	28.790.250	95,79		
	Honorarium Tim Pelaksana kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.200.000	9.200.000	100		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.461.000	1.461.000	100		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Cetak	628.250	628.250	100		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.360.000	1.360.000	100		
	Belanja Lembur	9.270.000	8.774.000	94,65		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.738.000	6.968.000	90,05		
3	Fasilitasi Analisis Jabatan	208.273.000	205.168.153	98,51		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	456.000	456.000	100		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - kertas dan cover	11.303.000	10.461.000	92,55		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Cetak	9.950.000	9.950.000	100		
	Jasa tenaga operator computer	24.000.000	24.000.000	100		
	Belanja konversi aplikasi sistem informasi	79.698.000	79.642.500	99,93		

No.	Sub Kegiatan	Alokasi dana (Rp)	Target Desember (Rp)	Realisasi Desember %	Hasil	Ket.
	Belanja makan dan minum rapat	3.540.000	3.540.000	100		
	Belanja Lembur	27.650.000	27.282.000	98,67		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51.676.000	49.119.853	95,05		
	Total	363.329.250	352.178.196	96,93		

2. Pelaksanaan Kegiatan dan Tugas Lainnya

- a. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Tugas terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3

No.	Kegiatan	Hasil	Ket.
A.	Kelembagaan		
	1. Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan Perangkat daerah berdasarkan PerMenPAN RB Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah	a. Nilai Peringkat Komposit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT b. Nilai komposit rata-rata PD Provinsi sebesar 72,45	
	2. Rapat Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se NTT Tahun 2024	Percepatan Pembentukan BRIDA di Kabupaten/Kota se NTT serta percepatan pengusulan kebutuhan jabatan fungsional Penata Perizinan	
	3. Melakukan Studi Tiru Fasilitasi Kelembagaan Perangkat Daerah (Penerapan Praktek Baik Reformasi Birokrasi) di Provinsi DIY	Fasilitasi Kelembagaan Perangkat Daerah (Penerapan Praktek Baik Reformasi Birokrasi) di Provinsi DIY	
	4. Asistensi Kelembagaan UPTD <i>Public Safety Center 119</i> Brigade Kupang Sehat pada Dinas Kesehatan Kota Kupang	Rekomendasi Gubernur NTT pembentukan kelembagaan UPTD <i>Public Safety Center 119</i> Brigade Kupang Sehat pada Dinas Kesehatan Kota Kupang	
	5. Asistensi Kelembagaan BAPPERIDA Kabupaten Flores Timur	Rekomendasi Gubernur NTT pembentukan kelembagaan BAPPERIDA Kabupaten Flores Timur	
	6. Asistensi Kelembagaan BRIDA Kabupaten Manggarai Barat	Rekomendasi Gubernur NTT pembentukan kelembagaan BRIDA Kabupaten Manggarai Barat	
	7. Asistensi Kelembagaan BAPPERIDA, Dinas Pendidikan dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao	Rekomendasi Gubernur NTT pembentukan kelembagaan BAPPERIDA, Dinas Pendidikan dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao	
	8. Asistensi Kelembagaan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Rekomendasi Gubernur NTT pembentukan kelembagaan	

No.	Kegiatan	Hasil	Ket.
	Kabupaten Manggarai	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Manggarai	
9.	Asistensi Kelembagaan RSUD Kelas D Pratama Raja Kabupaten Nagekeo	Rekomendasi Gubernur NTT pembentukan kelembagaan RSUD Kelas D Pratama Raja Kabupaten Nagekeo	
10.	Asistensi Kelembagaan BAPPERIDA Kabupaten Ngada	Rekomendasi Gubernur NTT pembentukan kelembagaan BAPPERIDA Kabupaten Ngada	
11.	Asistensi Kelembagaan RSUD Kelas D Borong Kabupaten Manggarai Timur	Rekomendasi Gubernur NTT pembentukan kelembagaan RSUD Kelas D Borong Kabupaten Manggarai Timur	
12.	Asistensi Kelembagaan BAPPERIDA Kabupaten Manggarai Timur	Rekomendasi Gubernur NTT pembentukan kelembagaan BAPPERIDA Kabupaten Manggarai Timur	
13.	Asistensi Kelembagaan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sumba Barat Daya	Rekomendasi Gubernur NTT pembentukan kelembagaan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sumba Barat Daya	
14.	Asistensi Kelembagaan UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Struktur Dinas Perhubungan Kabupaten Ende	Rekomendasi Gubernur NTT pembentukan kelembagaan UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Struktur Dinas Perhubungan Kabupaten Ende	
15.	Asistensi Kelembagaan BRIDA Kabupaten Sumba Timur	Rekomendasi Gubernur NTT pembentukan kelembagaan BRIDA Kabupaten Sumba Timur	
16.	Asistensi Kelembagaan BAPPERIDA, RSUD Bajawa, dan RS Pratama Riung Kabupaten Ngada	Rekomendasi Gubernur NTT pembentukan kelembagaan Asistensi Kelembagaan BAPPERIDA, RSUD Bajawa, dan RS Pratama Riung Kabupaten Ngada	
17.	Asistensi Kelembagaan BAPPERIDA Kabupaten TTU	Rekomendasi Gubernur NTT pembentukan kelembagaan BAPPERIDA Kabupaten TTU	
18.	Asistensi Kelembagaan BAPPERIDA Kabupaten Flores Timur	Rekomendasi Gubernur NTT pembentukan kelembagaan BAPPERIDA Kabupaten Flores Timur	
19.	Asistensi Kelembagaan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Manggarai Barat	Rekomendasi Gubernur NTT pembentukan kelembagaan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Manggarai Barat	
20.	Asistensi Kelembagaan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Flores Timur	Rekomendasi Gubernur NTT pembentukan kelembagaan UPTD Pengelolaan Air Limbah	

No.	Kegiatan	Hasil	Ket.
		Domestik Kabupaten Flores Timur	
	21.Asistensi Kelembagaan BAPPERIDA dan Kelembagaan Kecamatan Ndori Kabupaten Ende	Rekomendasi Gubernur NTT pembentukan kelembagaan BAPPERIDA dan Kelembagaan Kecamatan Ndori Kabupaten Ende	
	22.Asistensi Kelembagaan RS Kelas D Pratama Wewiku Kabupaten Malaka	Rekomendasi Gubernur NTT pembentukan kelembagaan RS Kelas D Pratama Wewiku Kabupaten Malaka	
	23.Asistensi kelembagaan Struktur organisasi BAPPERIDA, Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao	Rekomendasi Gubernur NTT pembentukan kelembagaan BAPPERIDA, Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao	
	24.Asistensi kelembagaan RSUD T. C Hilers dan Puskesmas Kabupaten Sikka	Rekomendasi Gubernur NTT pembentukan kelembagaan RSUD T. C Hilers dan Puskesmas Kabupaten Sikka	
	25.Asistensi kelembagaan RS Kelas D Pratama Hoba Kalla, Puskesmas Lolowano dan UPTD Latihan Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat	Rekomendasi Gubernur NTT pembentukan kelembagaan RS Kelas D Pratama Hoba Kalla, Puskesmas Lolowano dan UPTD Latihan Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat	
	26.Asistensi kelembagaan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumba Tengah	Rekomendasi Gubernur NTT pembentukan kelembagaan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumba Tengah	
	27.Asistensi kelembagaan UPTD Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor	Rekomendasi Gubernur NTT pembentukan kelembagaan UPTD Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor	
	28.Asistensi kelembagaan Rumah Sakit Kelas D Pratama Umbu Hunga Meha Nggongi Kabupaten Sumba Timur	Rekomendasi Gubernur NTT pembentukan kelembagaan Rumah Sakit Kelas D Pratama Umbu Hunga Meha Nggongi Kabupaten Sumba Timur	
	29.Penyusunan Peraturan Gubernur NTT tentang Pola Hubungan Kerja Staf Ahli Gubernur dan Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi NTT	Peraturan Gubernur NTT Nomor 50 Tahun 2024 tentang Pola Hubungan Kerja Staf Ahli Gubernur dan Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan	

No.	Kegiatan	Hasil	Ket.
		Pemerintahan Daerah Provinsi NTT	
	30. Penyusunan Keputusan Gubernur NTT tentang Pembidangan Koordinasi Asisten Sekda Provinsi NTT	Keputusan Gubernur NTT Nomor 321 Tahun 2024 tentang Pembidangan Koordinasi Asisten Sekda Provinsi NTT	
B.	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja		
	1. Melakukan Studi Tiru Penyusunan dan Penerapan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Penerapan Praktek Baik Reformasi Birokrasi)	Penyusunan dan Penerapan Analisis Jabatan dan ABK (Penerapan Praktek Baik RB);	
	2. Konsultasi dan koordinasi analisis jabatan dan analisis beban kerja di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;	Terlaksananya Penyusunan dan Penerapan Analisis Jabatan dan ABK (Penerapan Praktek Baik RB);	
	3. Melakukan Desk Penginputan Peta Jabatan Dalam Aplikasi SIASN Perencanaan Tahun 2024 Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Terlaksananya peta jabatan dalam Aplikasi SIASN berdasarkan jabatan yang ada dalam KepMenPAN RB Nomor 173 Tahun 2024	
	4. Penerbitan Rekomendasi hasil validasi kelas jabatan dan beban kerja untuk seluruh Perangkat Daerah	Rekomendasi untuk Triwulan I dan II hasil validasi kelas jabatan dan beban kerja perangkat daerah dan Form D pada Aplikasi TPP Pemerintah Provinsi NTT	
	5. Penyesuaian Sistem Informasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (SINJAB)	Telah Melakukan Penyesuaian Menu Input Informasi Jabatan dalam Aplikasi SINJAB berdasarkan KepmenPAN Dan RB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah	
	6. Penyusunan Konsep Evaluasi Jabatan Struktural Berdasarkan Struktur Organisasi yang baru.	Konsep Evaluasi Jabatan Struktural Berdasarkan Struktur Organisasi yang baru telah selesai disusun.	
	7. Koordinasi dan konsultasi Penyusunan Evaluasi Jabatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan validasi penyusunan evaluasi jabatan struktural dan fungsional dengan PIC Provinsi NTT pada Kementerian PAN dan RB - Melakukan validasi penyusunan evaluasi jabatan pelaksana dengan PIC Provinsi NTT pada KemenPAN dan RB 	
	8. Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan bagi Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Draft lampiran konversi evaluasi jabatan pelaksana dan draft evaluasi jabatan struktural dan fungsional.	

a. Permasalahan

- Perubahan regulasi yang menyebabkan perlu dilakukan penyesuaian penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan evaluasi jabatan untuk seluruh Perangkat Daerah yang harus menyesuaikan dengan SOTK terbaru.
- Penyesuaian terhadap sistem kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum melakukan penyesuaian sesuai dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 45 tentang Sistem Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Keterbatasan Anggaran mengakibatkan beberapa pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan skala prioritas. Tidak semua kegiatan yang dapat dilaksanakan bersamaan.
- Keberhasilan pencapaian target kinerja pada Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan juga bergantung pada komitmen perangkat daerah.

b. Solusi

- Telah dilakukan Sosialisasi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 45 tentang Sistem Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada seluruh perangkat daerah.
- Mengupayakan Pendampingan kepada masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan penyesuaian sistem kerja dan pelaksanaansquad team.
- Mengupayakan Pendampingan secara bertahap bagi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan evaluasi jabatan;
- Memaksimalkan anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan skala Prioritas.
- Memberikan ruang konsultasi dengan memanfaatkan media teknologi informasi yang ada.

II. Bagian Tatalaksana

1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Renja/DPA 2024

Alokasi anggaran tahun 2024 dan realisasi sampai dengan tanggal 30 Desember 2024 dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.4

No.	Sub Kegiatan	Alokasi dana	Target Desember%	Realisasi Desember %	Hasil	Ket.
1	Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	130.356.250	124.569.630	95.56		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	851.000	851.000	100		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Ketas Cover	742.000	742.000	100		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Cetak	4.659.250	4.509.250	96.78		
	Belanja Lembur	54.875.000	54.835.000	99.93		
	Honorarium Tim Pelaksana kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	20.100.000	20.100.000	100		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.780.000	18.780.000	100		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.349.000	24.752.380	81.56		
2	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	213.584.327	198.841.907	93.10		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - kertas cover	1.332.000	1.332.000	100		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Cetak	5.698.327	5.698.327	100		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	51.200.000	51.160.000	99.92		
	Honorarium Tim Pelaksana kegiatan dan tim sekretariat tim pelaksana kegiatan Penyelenggaraan KIPP Tingkat Nasional dan provinsi 2024	31.700.000	30.000.000	94.64		
	Belanja Lembur	68.405.000	66.310.000	96.94		
	Belanja Perjalanan Dinas dalam kota	13.200.000	13.200.000	100		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42.049.000	31.141.580	74,06		

2. Pelaksanaan Kegiatan dan Tugas Lainnya

- a. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Tugas terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5

No.	Kegiatan	Hasil	Ket.
A.	Tata Laksana Pemerintahan		
	1. Pendampingan Evaluasi SOP AP pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setdal Provinsi NTT	Review SOP AP Kep gub Nomor 324/KEP/HK/2024	
	2. Pendampingan Evaluasi SOP AP Biro Organisasi Provinsi NTT	Review SOP AP Kep Gub Nomor 262/KEP/HK/2024	
	3. Pendampingan Evaluasi SOP AP Biro Umum Setda Provinsi NTT	Review SOP AP Kep Gub Nomor 325/KEP/HK/2024	
	4. Pendampingan Evaluasi SOP AP Biro Administrasi Pimpinan Provinsi NTT	Terlaksananya Penyusunan Review SOP AP Kep Gub Nomor 443/KEP/HK/2022 (Proses KepGub)	
	5. Pendampingan Evaluasi SOP AP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Terlaksananya Penyusunan Review SOP AP (Proses review) Kep Gub 136/KEP/HK/2022	
	6. Pendampingan Evaluasi SOP AP Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Terlaksananya Penyusunan Review SOP AP Kep Gub 367/KEP/HK/2020 (Proses KepGub)	
	7. Pendampingan Evaluasi SOP AP pada Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Terlaksananya Review SOP AP Kep gub Nomor 306/KEP/HK/2021 (Proses Review)	
	8. Pendampingan Evaluasi SOP AP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Terlaksananya Review SOP AP Kep Gub Nomor 376/KEP/HK/2021 (Proses Review)	
	9. Pendampingan Evaluasi SOP AP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Terlaksananya Review SOP AP Kep Gub Nomor 283/KEP/HK/2020 (Proses Review)	
	10. Pendampingan Evaluasi SOP AP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Terlaksananya Review SOP AP Kep Gub Nomor 443/KEP/HK/2022 (Proses Review)	
	11. Pendampingan Evaluasi SOP AP Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT	Terlaksananya penyusunan SOP AP tahun 2024	
	12. Pendampingan Evaluasi SOP AP Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Terlaksananya Review SOP AP Kep Gub 108/KEP/HK/2020 (Proses review)	
	13. Pendampingan penyusunan SOP AP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Terlaksananya penyusunan SOP AP tahun 2024	
	14. Pendampingan Evaluasi SOP AP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Terlaksananya Revisi Keggub Nomor 443/KEP/HK/2022 (Proses Review)	
B	Pelayanan Publik		
	1. Rapat persiapan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dengan kabupaten/Kota;	Peresmian Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Manggarai Timur,	

No.	Kegiatan	Hasil	Ket.
		Ngada, TTS, dan Kota Kupang	
	2. Penyusunan Pedoman dokumen Kajian untuk pengusulan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik kepada Kemen PAN RB;	Pedoman dokumen Kajian untuk pengusulan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik kepada Kemen PAN RB	
	3. Pelaksanaan Evaluasi pelayanan Publik di Perangkat Daerah;	Terlaksananya Evaluasi Pelayanan Publik Melalui Metode Observasi Lapangan Di Perangkat daerah (Dinas Sosial, RSUD Prof. W.Z.Yohanes Kupang dan UPTD Samsat Kota Kupang di Kupang)	
	4. Rapat Penyampaian hasil Indeks Pelayanan Publik tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kemen PAN RB;	Tersedianya informasi Indeks Pelayanan Publik Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/ Kota tahun 2024	
	5. Pelaksanaan Evaluasi pelayanan Publik di Perangkat Daerah oleh Ombudsman RI	Terlaksananya Evaluasi Yanlik Melalui Metode Observasi Lapangan Di Perangkat daerah (DPMPTSP, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil dan RSUD Prof. W.Z.Yohanes)	
	6. Fasilitasi Penyusunan / Reviu Penerapan Standar Pelayanan	Terlaksananya evaluasi penerapan SP di 4 PD yaitu : Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.	
	7. Penyiapan laporan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Biro Organisasi Setda Provinsi NTT;	Tersedianya data SKM Biro Organisasi Semester II tahun 2024.	
	8. Mengusulkan pengajuan Proposal Inovasi Pelayanan Publik untuk diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2024;	Seleksi Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.	
	9. Koordinasi dengan USAID ERAT untuk mendukung peningkatan kualitas Pelayanan Publik;	Terlaksananya kerjasama dengan USAID ERAT Di Provinsi dan Kab/Kota terutama Lima Kabupaten Wilayah Kerja Program USAID ERAT.	
	10. Pelaksanaan Evaluasi Pelayanan Publik (PEKPPP) PD Provinsi dan Kab/Kota	Penilaian F01 untuk lokus PD Prov dan pemeriksaan hasil penilaian F02 Kab/Kota dari evaluator kab/kota oleh evaluator provinsi	
	11. Penyiapan Laporan Standar Pelayanan PD Prov untuk	Peginputan laporan Standar Pelayanan untuk dilaporkan	

No.	Kegiatan	Hasil	Ket.
	dilaporkan ke Kementerian		

b. Permasalahan

- Sampai saat ini baru 3 (tiga) Perangkat Daerah/Biro/UOBK telah menetapkan SOP AP dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur dan 2 (dua) Perangkat Daerah/Biro/UOBK yang masih dalam proses penetapan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur terkait SOP AP;
- Hasil Review SOP AP pada 15 (lima belas) Perangkat Daerah/Biro/UOBK sementara dalam proses perbaikan Perangkat Daerah/Biro/UOBK dan belum dikembalikan ke Biro Organisasi Setda Provinsi NTT;
- Masih terdapat 22 (dua puluh dua) Perangkat Daerah/Biro/UOBK belum menyampaikan draf revisi SOP AP untuk di reviu;
- Kegiatan Sosialisasi dan Informasi Pendampingan Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik kepada 5 PD Provinsi yaitu Dinas Sosial, DPMPSTP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pencatatan Sipil RSUD Prof. W.Z. Johannes Kupang mendapat sanggahan terkait ketidakpuasan perolehan nilai yang ditetapkan oleh Ombudsman RI.
- Hasil Penilaian Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Ombudsman RI untuk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 memperoleh nilai 77,85 point dibandingkan dengan Tahun 2023 dengan nilai 63,92 Pont;
- Hasil Penilaian Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Ombudsman RI untuk Kabupaten/Kota untuk tahun 2024 terjadi peningkatan tingkat kepatuhan pelayanan publik, tidak terdapat lagi zona merah dan nilai tertinggi diperoleh Kabupaten Timor Tengah Utara 91,82 point, Manggarai Barat 89,62 point dan Kota Kupang 86,62 point sedangkan dibandingkan dengan tahun 2023 terdapat 4 kabupaten kota mendapat Kategori D (zona merah)
- Penyampaian Laporan Pelaksanaan survey kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh perangkat daerah tidak tepat

waktu dan format laporan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.

- Kegiatan Sosialisasi dan Informasi Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) kepada 3 PD yaitu Dinas Sosial, RSUD W. Z. Yohannes Kupang dan UPTD Pendapatan wilayah kota Kupang, mendapat respon baik dari perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian.

c. Solusi

- Biro Organisasi telah menyampaikan Surat Penegasan Evaluasi dan revisi SOP AP kepada Perangkat Daerah sehingga diharapkan seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT segera memasukan Draft SOP AP untuk dapat di Review dan ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur;
- Memberikan ruang konsultasi dengan memanfaatkan media teknologi informasi yang ada.
- Untuk peningkatan kualitas pelayanan publik unit penyelenggara pelayanan publik dan diperlukan pengalokasian anggaran yang proporsional.
- Perlu dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan publik dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

III. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Renja/DPA 2024

Alokasi anggaran tahun 2024 dan realisasi sampai dengan tanggal 30 Desember 2024 dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6

No.	Sub Kegiatan	Alokasi dana	Target Desember %	Realisasi Desember %	Hasil	Ket.
1	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	102.678.125	92.027.570	89.63		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.758.000	1.688.000	96,02		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - kertas dan	1.844.000	1.741.800	94.41		

No.	Sub Kegiatan	Alokasi dana	Target Desember %	Realisasi Desember %	Hasil	Ket.
	cover					
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Cetak	2.966.125	2.965.800	99,99		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.720.000	7.520.000	86,24		
	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	26.850.000	26.850.000	100		
	Honor tenaga ahli	8.000.000	8.000.000	100		
	Belanja Lembur	18.406.000	13.339.000	72,47		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.134.000	23.523.770	90,01		
	Belanja perjalanan dinas dalam kota	8.000.000	6.400.000	80,00		
2	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas kinerja	255.606.250	240.908.851	94,25		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2.333.000	2.333.000	100		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - kertas Cover	3.546.000	2.066.000	58,29		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Cetak	8.966.250	8.775.200	97,87		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000	10.500.000	100		
	Honorarium Tim Pelaksana kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	83.900.000	83.900.000	100		
	Belanja Lembur	53.475.000	44.941.000	84,04		
	Belanja Perjalanan Dinas dalam kota	13.600.000	13.600.000	100		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	79.286.000	78.113.651	98,52		
3	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	52.678.125	25.397.346	48,21		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	234.000	234.000	100		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - kertas dan cover	502.000	502.000	100		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Cetak	1.240.125	1.239.900	99,98		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000	3.000.000	100		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.766.000	8.821.446	47,01		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.000.000	11.600.000,00	96,67		

2. Pelaksanaan Kegiatan dan Tugas Lainnya

- a. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Tugas terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7

No.	Kegiatan	Hasil	Ket.
A.	Reformasi Birokrasi		
	1. Evaluasi RB General Provinsi NTT Tahun 2023 dan Penyusunan Rencana Aksi RB General Tahun 2024 Perangkat Daerah Pengampu.	Terlaksananya evaluasi terhadap renaksi RB general tahun 2023	
	2. Penyampaian penyusunan rencana aksi RB general dan RB Tamatik pemerintah provinsi NTT tahun 2024	Tersusunnya rencana aksi RB general dan RB Tamatik tahun 2024 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-tTK9jUiEGePZrAsS9d8bwvGc8RBi8ka/edit#gid=1872451300	
	3. Penyusunan <i>Logical Framework</i> dan Rencana Aksi RB Tematik Pemprov NTT	Tersusunnya <i>Logical Framework</i> Aksi RB Tematik Pemprov NTT	
	4. Rapat Rencana Aksi Tindak Lanjut Evaluasi (RATL) RB General dan Tematik Berdasarkan Hasil KemenPANRB Tahun 2023.	Terlaksananya Rapat Rencana Aksi Tindak Lanjut Evaluasi (RATL) RB General dan Tematik Berdasarkan Hasil KemenPANRB Tahun 2023.	
	5. Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut Evaluasi (RATL) RB General.	Tersusunnya RATL RB general https://bit.ly/FormatRencanaAksiRB	
	6. Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut Evaluasi (RATL) RB Tematik.	Tersusunnya RATL RB tematik https://bit.ly/FormatRencanaAksiRB	
	7. Menyusun draft peraturan gubernur tentang <i>roadmap</i> reformasi birokrasi pemerintah provinsi NTT tahun 2023-2026	Tersusunnya draft peraturan gubernur tentang <i>roadmap</i> reformasi birokrasi pemerintah provinsi NTT tahun 2023-2026	
	8. Menyusun SK Tim Pelaksana RB Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2024	Tersusunnya Keputusan Tim Pelaksana RB Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2024	
	9. Melakukan studi tiru pelaksanaan reformasi birokrasi di Jogjakarta	Memahami pelaksanaan reformasi birokrasi	
B	Akuntabilitas Kinerja		
	1. Menyusun LKIP Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2023.	Tersusunnya dokumen LKIP Pemprov NTT Tahun 2024	
	2. Menyusun PK Gubernur NTT tahun 2024 tahun 2024	Tersusunnya dokumen PK Gubernur 2024	
	3. Menyusun Rencana Aksi Pemprov. NTT Tahun 2024	Tersusunnya <i>Rencana Aksi Pemprov, NTT TAHUN 2024</i>	
	4. Memfasilitasi penyusunan LKIP, PK dan Rencana Aksi PD lingkup Pemprov. NTT	Tersusunnya dokumen LKIP, PK dan Rencana Aksi PD.	
	5. Melakukan Fasilitasi Dan Pembinaan SAKIP di Kabupaten, Malaka, Kab. Sikka, Kab. Alor, Kab. TTS	Terlaksananya faslitasi dan pembinaan sakip di Kabupaten, Malaka, Kab. Sikka, Kab. Alor, Kab. TTS	
	6. Melakukan konsultasi penilaian AKIP di Kementerian PAN dan RB	Terlaksananya Kegiatan Konsultasi	
	7. Menyusun RATL Penilaian AKIP Pemprov NTT Tahun 2023	Tersusunnya RATL AKIP Tahun 2024	
	8. Memfasilitasi penyusunan Cascading PD	Tersusunnya Cascading PD	
	9. Melakukan Evaluasi AKIP PD	Terlaksananya kegiatan evaluasi AKIP PD	

No.	Kegiatan	Hasil	Ket.
	10. Hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi NTT tahun 2024	Pemrintah Provinsi NTT memperoleh Nilai 63,68 dengan predikat B	
C.	Budaya Kerja		
	1. Koordinasi Pelaksanaan Survei Indeks BerAKHLAK Tahun 2024 KemenPANRB	Terlaksananya Survei Indeks BerAKHLAK Provinsi NTT Tahun 2024	
	2. Pelaksanaan Survei Internal Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	Terlaksananya Survei Internal Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	
	3. Sosialisasi Implementasi Core Values BerAKHLAK di Pemerintah Provinsi NTT	Implementasi Core Values BerAKHLAK di Pemerintah Provinsi NTT	
	4. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan budaya kerja	Terlaksananya monitoring dan Evaluasi pelaksanaan budaya kerja	

b. Pemasalahan

- Dalam proses pembuatan Peraturan Gubernur tentang *Roadmap* RB Pemerintah Provinsi NTT tahun 2024-2026 masih dalam bentuk draf di Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Pelaksanaan Budaya Kerja mengalami perubahan nomenklatur kegiatan sehingga mengakibatkan kegiatan tertunda sampai dengan terjadi pergeseran anggaran 2024;
- Nilai SAKIP Pemprov NTT belum mencapai target RPJMD
- Masih banyak PD yang belum membuat Cascading Kinerja

c. Solusi

- Biro Organisasi telah melakukan desk dan pendampingan serta penjelasan mengenai penyusunan rencana aksi RB general maupun RB tematik kepada PD pengampu/ pelaksana RB general dan RB tematik.
- Berkoordinasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur agar draft peraturan gubernur tentang *roadmap* reformasi birokrasi pemerintah provinsi NTT tahun 2023-2026 dapat segera dipergubkan.
- Kegiatan baru dapat dilaksanakan setelah realisasi pergeseran anggaran;
- Melakukan koordinasi mengenai penyusunan roadmap dengan kementerian PANRB.

- Melakukan reviu berbagai dokumen perencanaan agar terjadi keselarasan
- Melakukan desk penyusunan Cascading

3.4. Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI			FORMULA INDIKATOR
				AWAL 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	
1.	Meningkatnya Kualitas Penataan Kelembagaan, Tataletasana, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Memiliki Predikat RB "Istimewa" (Kategori AA/Nilai = 80-90)	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Predikat RB "Istimewa" (Kategori AA/Nilai = 80-90) adalah Indikator yang mengukur tingkat kualitas hasil pelaksanaan RB oleh Perangkat Daerah yang memiliki Nilai/Indeks 80 – 90.	39,39	45,45	NA	<p style="text-align: center;">9</p> <p>Jumlah PD Provinsi yang memperoleh Predikat RB "Istimewa"</p> <hr/> <p>Total Jumlah PD Lingkup Provinsi NTT</p> <p style="text-align: right;">X 100%</p>
		Level Maturitas Kelembagaan	Level Maturitas Kelembagaan adalah Penilaian tingkat kemandirian Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Daerah menggunakan instrumen pengukuran dengan 11 (sebelas) variabel indikator yang meliputi: a. perencanaan; b. monitoring dan pengendalian; c. penjaminan mutu layanan; d. standar operasional prosedur; e. pendidikan dan pelatihan; f. analisis kebijakan dan pemecahan masalah; g. manajemen sumber daya yang terukur; h. manajemen resiko;	40,67	45	40,67	
							<p>Kemampuan Organisasi Daerah</p> <hr/> <p style="text-align: center;">= $\frac{\text{Total Nilai PD Lingkup Provinsi NTT}}{\text{Jumlah PD Lingkup Provinsi NTT}}$</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI			FORMULA INDIKATOR
				AWAL 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	
1	2	3	4	5	6	7	9
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik adalah Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik oleh Kementerian PAN dan RB.	2,81 (cukup)	2,85 (cukup)	3,56 (Baik)	Total Nilai 6 Komponen Standar Pelayanan x 0,75 + Hasil Penilaian Masyarakat melalui F03 x 0,25
		Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik	Persentase Perangkat Daerah Menerapkan RB Tematik adalah indikator yang mengukur masalah terkait tata kelola yang berhubungan langsung dengan kinerja perangkat daerah yang diharapkan (kemudahan investasi, kemiskinan, inflasi, penggunaan produk dalam negeri dan digitalisasi administrasi pemerintah).	0	15,15	72,72	$\frac{\text{PD yang menjalankan RB Tematik}}{\text{Total PD Pengampu RB Tematik}} \times 100\%$

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI			FORMULA INDIKATOR
				AWAL 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	
1	2	3	4	5	6	7	9
		Presentase Peringkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja "memuaskan" A.	Presentase Peringkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja "memuaskan" A adalah aktifitas analisis yang sistematis untuk menilai penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada PD dilingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Tenggara Timur.	6	12	35.89	$\frac{\text{Jumlah PD yang memperoleh nilai A (memuaskan)}}{\text{Jumlah PD Lingskup Provinsi NTT}} \times 100\%$

Berdasarkan data pada Tabel 3.1, Capaian kinerja program sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun Anggaran 2024 dengan rincian realisasi masing-masing sub indikator sebagai berikut :

1. Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat RB “Istimewa” (Kategori AA/Nilai = 80-90)

PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menekankan tentang RB berdampak tidak lagi mengatur tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang selama ini dilakukan. Hal ini menyebabkan indikator sasaran/tujuan RB yang telah ditetapkan dalam Renstra yaitu Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan RB Tematik sudah tidak relevan lagi dengan peraturan tersebut sehingga indikator h harus dilakukan perubahan.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2024 dilakukan dengan mengukur realisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB General dan RB Tematik) dalam bentuk rencana aksi terhadap *RoadMap* RB Pemerintah Provinsi NTT Reformasi Tahun 2024-2026.

Penyusunan *RoadMap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 telah selesai disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 82 Tahun 2024 tentang *RoadMap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. Nilai/Indeks Reformasi Birokrasi akan dikeluarkan oleh Kementrian PANRB pada akhir bulan Januari tahun 2025.

2. Level Maturitas Kelembagaan

Dalam upaya pencapaian target kegiatan tahun 2024 dan sebagai optimalisasi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT, maka Pemerintah Provinsi NTT telah melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penataan kelembagaan di Perangkat Daerah Provinsi NTT, yaitu :

Level maturitas kelembagaan adalah tingkat kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuannya. Tingkat maturitas SPIP terbagi menjadi enam level, yaitu: Belum ada, Rintisan, Berkembang, Terdefinisi, Terkelola dan Terukur, Optimum. Semakin tinggi level maturitas SPIP, maka kualitas penyelenggaraan SPIP juga semakin baik. Penilaian maturitas SPIP mencakup beberapa unsur, seperti: Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah, Manajemen Risiko Indeks, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi, Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pada tahun 2024 level maturitas kelembagaan masih menggunakan penilaian tahun 2022 yaitu 40,67 atau Kategori Tinggi. Pada tahun 2023 dan tahun 2024 tidak dilakukan Penilaian Kematangan Perangkat Daerah karena tidak tersedia anggaran. Penilaian kematangan Perangkat Daerah merupakan penilaian terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi dengan tingkat kematangan suatu organisasi yang meliputi: a.) perencanaan; b.) monitoring dan pengendalian; c.) penjaminan mutu layanan; d.) standar operasional prosedur; e.) pendidikan dan pelatihan; f.) analisis kebijakan dan pemecahan masalah; g.) manajemen sumber daya yang terukur; h.) manajemen resiko; i.) pengukuran kinerja; j.) pengembangan inovasi layanan; dan k.) budaya organisasi. Kematangan Perangkat Daerah diukur berdasarkan pencapaian yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pada setiap variabel dan indikator.

Masih terdapat Perangkat Daerah yang masih memiliki tingkat kematangan organisasi pada level sedang dan rendah, sehingga diperlukan upaya peningkatan kinerja pada aspek tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi melalui perbaikan sistem kerja pada 11 (sebelas) variabel yang digunakan sebagai instrumen penilaian kematangan Perangkat Daerah.

3. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik adalah alat untuk mengukur kinerja pelayanan publik di Indonesia. Indeks ini mengacu pada beberapa aspek, seperti: Kebijakan pelayanan, Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, Inovasi Pelayanan. Standar pelayanan publik adalah tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan publik. Standar ini menjadi acuan penyelenggara pelayanan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur.

Pada tahun 2024 realisasi Indeks Pelayanan Publik adalah 3,56 (Baik) dari target 2,85 (Cukup). Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 3,60 (Baik) maka terjadi penurunan sebesar 0,04% disebabkan karena nilai Indeks Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalami penurunan dari 69,77 menjadi 67,22 (Zona Kuning, Kategori C, Kualitas Pelayanan Sedang). Jika dibandingkan dengan target akhir RPD 2026 sebesar 3,2 (Baik) maka sudah melampaui target sebesar 0,36%.

4. Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik

Menindaklanjuti Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *RoadMap* Reformasi Birokrasi 2020-2024 menyatakan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) mengalami penajaman dengan metode *double track* berupa RB General dan RB Tematik, sehingga *output* pelaksanaan Refomasi Birokrasi merupakan perhitungan akumulasi terhadap pelaksanaan RB General dan RB Tematik.

RB Tematik merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan masyarakat. Dengan RB Tematik, diharapkan instansi pemerintah dapat lebih fokus menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan kinerja yang diharapkan. Perangkat Daerah Pengampu pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu :

- Tema Pengentasan kemiskinan (13 PD Pengampu)
- Tema Digitalisasi administrasi pemerintahan (2 PD Pengampu)
- Tema Peningkatan realisasi investasi (3 PD Pengampu)
- Tema Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri/P3DN (Seluruh PD)
- Tema Pengendalian inflasi (5 PD Pengampu)

Pada Tahun 2024 realisasi indikator persentase perangkat daerah yang menerapkan RB Tematik adalah 72,72% dari target yang ditetapkan sebesar 15,15% atau capaian 480%. Hal ini disebabkan target PD yang menerapkan RB tematik pada tahun 2024 sebanyak 5 PD dan 33 PD sedangkan realisasi PD yang menerapkan RB tematik sebanyak 24 PD dan 33 PD. Pada tahun 2023 peralihan pelaksanaan RB dari PMPRB ke RB General dan RB Tematik, sehingga pada tahun tersebut tidak ditetapkan persentase PD yang menerapkan RB tematik. Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2026 sebesar 45,45%, realisasi tahun 2024 telah melampaui sebesar 160%.

Naiknya realisasi indikator ini disebabkan para PD pengampu RB tematik melaksanakan penyusunan rencana aksi RB tematik yang merupakan alat ukur evaluasi pelaksanaan RB tahun 2024.

5. Presentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” A.

Pada tahun 2024 target Presentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja A “memuaskan” adalah 12%. Realisasi 35,89% atau 14 Perangkat Daerah telah memperoleh nilai SAKIP dengan predikat A “memuaskan” antara lain : Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Biro

Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan 25 Perangkat Daerah memperoleh predikat BB. Meskipun capaian nilai SAKIP Tahun 2024 memenuhi target namun terdapat beberapa catatan yang harus mendapat perhatian antara lain :

- Masih terdapat rumusan indikator yang belum SMART pada beberapa perangkat daerah;
- Perangkat Daerah sudah menyusun pohon kinerja namun belum sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Terdapat beberapa PD belum menganalisa efisiensi anggaran dalam penyusunan LKIP PD.
- Terdapat beberapa PD yang IKUnya belum dilengkapi dengan formula perhitungan.

Upaya yang dilakukan adalah Biro Organisasi sebagai pengampu SAKIP akan melakukan pendampingan kepada PD dalam membuat pohon kinerja, menyusun LKIP dan IKU.

PENUTUP

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Monitoring dan Evaluasi dilakukan untuk dapat mengawasi pelaksanaan masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Monitoring dan Evaluasi dilakukan untuk memberikan gambaran capaian kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi NTT selama Tahun 2024;
- c. Monitoring dan Evaluasi dilakukan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Tahun Berikutnya.

Kupang, 31 Januari 2025

Plt. Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur



Djoese S. M. Nai Buti, S.Pt, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197103291999031002